

EFEKTIVITAS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KELURAHAN KARANGWARU KOTA YOGYAKARTA

THE EFFECTIVENESS OF KOTA TANPA KUMUH PROGRAM IN KARANGWARU VILLAGE OF YOGYAKARTA CITY

Oleh: Intania Irfani dan F. Winarni, M.Si, Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Yogyakarta
intania.irfani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Kota Tanpa Kumuh di Kota Yogyakarta, khususnya di Kelurahan Karangwaru. Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Permukiman di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, Koordinator dan Sekretaris Badan Keswadayaan Masyarakat Tridaya Waru Mandiri, serta masyarakat Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta. Instrument dalam penelitian ini adalah peneliti, dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, BKM Tridaya Waru Mandiri serta masyarakat dalam program KOTAKU telah sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Dalam pelaksanaan program KOTAKU, khususnya dalam penyediaan jalan lingkungan, keteraturan bangunan, penyediaan sistem drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, serta penyediaan ruang terbuka publik sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Namun untuk penyediaan pengamanan kebakaran, program KOTAKU belum dapat merealisasikannya. Hal ini menyebabkan program KOTAKU belum bisa dikatakan efektif karena salah satu kriteria dari program KOTAKU belum dapat dipenuhi di Kelurahan Karangwaru.

Kata kunci: Efektivitas, KOTAKU, Karangwaru

Abstract

This study aims to investigate the effectiveness of Kota Tanpa Kumuh Program in Yogyakarta City, especially in Karangwaru Village. This study used the qualitative research method with the descriptive approach. The research informants were the Head of the Housing Section in the Office of Regional Housing and Infrastructure of Yogyakarta City, the Coordinator and Secretary of the Tridaya Waru Mandiri Community Self-Reliance Agency, and the community of Karangwaru Village, Yogyakarta City. The research instrument was the researcher, equipped with interview and observation guidelines. The data were collected through interviews, observations, and documentation. The data trustworthiness was enhanced by the source triangulation. The data were analyzed using Matthew B. Miles and A. Michael Huberman's interactive analysis technique through the stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the study showed that the roles of the Office of Regional Housing and Infrastructure Yogyakarta City, the Tridaya Waru Mandiri Community Self-Reliance Agency, and the community in the KOTAKU program had been in accordance with their main tasks and functions. The implementation of the KOTAKU program, particularly in the provision of roads in the environment, building orderliness, drainage system provision, water supply, waste management, wastewater management, and provision of public open spaces, was in line with the stated objectives. However, for the provision of fire safety, the KOTAKU program had not been able to realize it. Therefore, the KOTAKU program had not been considered effective because one of the criteria of the KOTAKU program could not be met in Karangwaru Village.

Keywords: effectiveness, KOTAKU, Karangwaru

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk perkotaan akibat adanya laju urbanisasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan menyebabkan berkembangnya kawasan permukiman padat penduduk dan kumuh di wilayah perkotaan. Akibatnya terjadi lonjakan jumlah orang-orang yang datang dan menetap di Kota serta menjadikan Kota semakin padat (Saraswati, 2004:1). Hal ini akan mengakibatkan munculnya pemukiman kumuh di kota-kota besar.

Pada tahun 2015, Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementrian PUPR) mencetuskan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) untuk mengatasi semakin bertambahnya permukiman kumuh di kota-kota di Indonesia menjadi 0 (nol) hektar. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) ini akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Salah satu kota yang menerapkan program KOTAKU adalah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota nomor 216 Tahun 2016, di Kota Yogyakarta masih terdapat 13 kecamatan dan 36 Kelurahan yang memiliki kawasan kumuh. Diantara banyaknya Kelurahan yang tercatat dalam SK Walikota Yogyakarta Nomor 216 Tahun 2016

sebagai kawasan kumuh, Kelurahan Karangwaru merupakan satu dari sekian banyak kelurahan di Kota Yogyakarta yang mendapatkan program KOTAKU. Kelurahan Karangwaru memiliki 14 RW (Rukun Warga), yang dari ke-14 RW tersebut masih terdapat 8 RW yang masuk dalam kawasan kumuh, diantaranya adalah RW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, dan 14.

Kelurahan Karangwaru dilalui oleh 2 sungai yaitu sungai Buntung dan sungai Code. Kedua sungai tersebut dimanfaatkan oleh warga yang tinggal secara spontan di badan sungai untuk menunjang kehidupan mereka. Salah satunya untuk mencuci pakaian, alat rumah tangga bahkan mereka membuang sampah/limbah di sungai tersebut. Hal itu dikarenakan hampir disekitar wilayah di Kelurahan Karangwaru belum tersedia TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara). Adapun sistem pengolahan sampah rumah tangga ditempatkan ditong sampah yang berada di tiap rumah. Namun, untuk permukiman di sepanjang sungai Buntung, sampah banyak dibuang ke sungai. Hal ini mengakibatkan kondisi sungai sangat kotor dan mengakibatkan pendangkalan sungai. Jika hal ini berlanjut maka banjir akan datang sewaktu-waktu ketika hujan datang.

Menurut David Easton, sebagaimana dikutip oleh Muchsin dan

Fadilah Putra dalam buku Hukum dan Kebijakan Publik mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah (Muchsin dan Fadillah, 2002: 23). Dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Karangwaru masih terdapat banyak kendala yang dihadapi. Seperti banyaknya warga yang tidak ingin rumah mereka dipotong karena akan dijadikan jalan inspeksi, selain itu rumah mereka dekat dengan sungai. Padahal salah satu kriteria dari Program KOTAKU adalah penyediaan jalan inspeksi yang memadai. Mereka menganggap bahwa mereka berhak menolak karena mereka sudah bertahun-tahun tinggal di kawasan tersebut. Namun, pemotongan rumah tersebut juga memiliki dampak yang akan menyebabkan munculnya lokasi kumuh baru. Sehingga warga tidak memiliki cukup ruang untuk menempatkan barang-barang mereka.

Kelurahan Karangwaru mendapatkan anggaran awal untuk program KOTAKU di tahun 2015 sebesar 235 juta dan rencananya dana tersebut digunakan untuk membangun jembatan, saluran air hujan, konblok, dan pembuangan air limbah. Pada kenyataannya dana sebesar 235 juta tersebut baru berhasil membangun 3

sistem drainase, yaitu pembuangan air drainase ke sungai Buntung, pembuangan air dengan sistem biofori, dan pembuangan air drainase ke SPAH (Saluran Pembuangan Air Hujan). Namun, pembangunan ketiga saluran drainase tersebut yang ditanam antara ruas jalan satu dengan ruas jalan lainnya belum tersambung secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian Fikra Sutan Purnama pada tahun 2007 di Kelurahan Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat untuk program KOTAKU sudah aktif dalam kegiatan pelaksanaan program yang dijalankan. Hal ini juga terjadi di Kelurahan Karangwaru. peran serta masyarakat Karangwaru dalam setiap kegiatan sudah dapat dikatakan aktif, meskipun masih ada masyarakat yang hanya diam dan menunggu ketika rapat sedang berlangsung.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Riant Nugroho (2012: 707-710), yang menyatakan bahwa pada prinsipnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi untuk mengukur keefektifan implementasi program, yaitu tepat program, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif dapat mencapai hasil (outcome) yang

diharapkan, atau mencapai target/tujuan berkaitan dengan upaya pengukuran ataupun penilaian terhadap sejauh mana tercapainya suatu tujuan (Dunn, 2013: 429)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Juli 2017 hingga Agustus 2017. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, BKM Tridaya Waru Mandiri serta di Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta.

Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam program KOTAKU di Kelurahan Karangwaru yaitu Kepala Bidang Permukiman Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, Koordinator BKM Tridaya Waru Mandiri, Sekretaris BKM Tridaya Waru Mandiri dan masyarakat Kelurahan Karangwaru.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti sendiri.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian dilakukan dengan teknik analisis interaktif seperti yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta

Menurut Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta mencatat ditahun 2015 luas permukiman kumuh di Kota Yogyakarta mencapai 278,7% atau 8,17% dari total

keseluruhan luas kota Yogyakarta. Dari jumlah wilayah kumuh tersebut, 90 persen diantaranya berlokasi di bantaran sungai. Sungai yang dijadikan hunian kumuh di Kota Yogyakarta adalah sungai Winongo disebelah barat, sungai Code di bagian Tengah, dan sungai Gajahwong di bagian timur.

Di tahun 2015 program KOTAKU hadir sebagai program untuk menanggulangi masalah kumuh di perkotaan. Sebenarnya program KOTAKU merupakan program yang memperbaharui program P2KKP. Selain itu Program KOTAKU merupakan program kelanjutan dari program PLPBK. Penelitian ini mengacu pada teori efektifitas implementasi yang memuat ada “lima tepat” untuk mengukur keefektifan suatu program (Riant Nugroho, 2012), antara lain:

Tepat Kebijakan

Dalam program KOTAKU di Kota Yogyakarta ini lebih menitikberatkan pada pembangunan fisik disepanjang bantaran sungai untuk dilakukan perbaikan. Penataan di kawasan sungai Buntung dan sungai Code tidak lepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat Kelurahan Karangwaru. Akan tetapi program tersebut baru dapat dinikmati oleh sebagian RW saja karena masih terkendala oleh dana. Awal mula Program KOTAKU berjalan di Kelurahan Karangwaru, pemerintah

memberikan dana sebesar 250 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan dan pembuatan sistem drainase di setiap RW di Kelurahan Karangwaru. Padahal rencananya dana tersebut digunakan untuk membangun jembatan, saluran air hujan, konblok, dan pembuangan air limbah. Dalam program KOTAKU terdapat 8 kriteria yang harus dipenuhi agar suatu Kelurahan dapat dikatakan bebas dari kumuh diantaranya adalah keteraturan bangunan, jalan lingkungan yang memadai, drainase lingkungan, penediaan air bersih, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, dan ruang terbuka publik. Karena terbatasnya dana yang diberikan untuk Program KOTAKU, untuk pembuatan pafing blok, jembatan penghubung, dan pengadaan sumur resapan program KOTAKU dibantu oleh Program PLPBK yang diampu oleh LPPM.

Selain itu untuk mengolah air limbah Kelurahan Karangwaru sudah memiliki sistem drainase. Air limbah akan dialirkan ke sungai melalui tiga 3 sistem drainase, yaitu pembuangan air drainase ke sungai Buntung, pembuangan air dengan sistem biofori, dan pembuangan air drainase ke SPAH (Saluran Pembuangan Air Hujan). Sedangkan masalah sampah, Kelurahan Karangwaru sudah memiliki petugas kebersihan yang dinamakan OP

(Operasional Pemeriliharaan). OP nantinya yang akan mengangkut sampah-sampah warga tiap RW.

Namun, ada salah satu dari 8 kriteria program KOTAKU belum bisa direalisasikan, yaitu penyediaan pengamanan kebakaran. Pengamanan kebakaran belum menjadi prioritas dari program KOTAKU terutama di Kelurahan Karangwaru. hal ini menyebabkan program KOTAKU belum dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari indikator tepat kebijakan.

Tepat Pelaksana

Indikator kedua adalah tepat pelaksana. Kerjasama yang terjadi dalam implementasi program KOTAKU terkait dengan tiga hal, yaitu kerjasama antara Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta dengan BKM Tridaya Waru Mandiri, kerjasama antara BKM Tridaya Waru Mandiri dengan masyarakat Kelurahan Karangwaru, kerjasama antara Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta dengan masyarakat Kelurahan Karangwaru. Selain itu terdapat kerjasama antara BKM Tridaya Waru Mandiri dengan LPMK dan Lurah, serta kerjasama antara BKM Tridaya Waru Mandiri dengan Bappeda.

Tabel 1. Pelaksana Program KOTAKU di Kelurahan Karangwaru

No	Pelaksana Program KOTAKU	Peran Pelaksana dalam Program KOTAKU
1	Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta	1. Koordinator dan fasilitator dalam penanganan kumuh di Kota Yogyakarta terutama di Kelurahan Karangwaru 2. Memonitoring Program KOTAKU
2.	BKM Tridaya Waru Mandiri	1. Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan perencanaan Program KOTAKU 2. Memonitor, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan Program KOTAKU termasuk penggunaan dana Program KOTAKU 3. Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan Program KOTAKU 4. Membangun transparansi kepada masyarakat 5. Memfasilitasi aspirasi masyarakat dalam usulan program KOTAKU untuk dapat dikomunikasikan
3.	Masyarakat	1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan 2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 3. Partisipasi dalam pemanfaatan dan evaluasi pembangunan 4. Partisipasi dalam pemanfaatan pembangunan
4.	Bappeda	Menyetujui perencanaan Program KOTAKU yang diajukan oleh masyarakat Kelurahan Karangwaru
5.	Komunitas Karangwaru Riverside (KKR)	1. Sebagai pemelihara infrastruktur di Kelurahan Karangwaru 2. Sebagai pendorong pelaksanaan program-program selanjutnya

(Sumber: Penelitian, 2017)

Tepat Target

Riant Nugroho (2012: 708) mengungkapkan ketepatan target berkenaan dengan tiga hal. *Pertama*, kesesuaian target yang diintervensi dengan yang direncanakan. Program KOTAKU di Kelurahan Karangwaru didukung oleh Program yang berasal dari Provinsi yaitu Program M3K (Mundur, Munggah, Madep, Kali). Kedua program ini mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengatasi permasalahan sosial dibidang penanganan kumuh. Setiap program yang berjalan di Kelurahan Karangwaru saling mendukung dan saling melengkapi. Misalnya saja dalam pelaksanaan program M3K. Program M3K hanya mengatasi masalah permukiman di bantaran sungai sedangkan penyebab kekumuhan tidak dijadikan prioritas dalam Program M3K. Namun, karena ada Program KOTAKU selain kawasan kumuh di bantaran sungai, penyebab kekumuhan di Kelurahan Karangwaru bisa diberantas.

Selain M3K di Kelurahan Karangwaru, program KOTAKU juga didukung oleh program PLPBK (Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas) yang dilaksanakan oleh LPMK. Namun antara program KOTAKU dengan program PLPBK tidak ada tumpang tindih, meskipun ada beberapa kegiatan yang sama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh program KOTAKU Berdasarkan

penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Karangwaru tidak ada intervensi dengan program lain.

Kedua, adanya kesiapan target yang diintervensi untuk mendukung atau menolak kebijakan. Awal adanya program, masyarakat tidak berpartisipasi terhadap program KOTAKU yang sedang berjalan. Namun karena sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kimpraswil serta sosialisasi dari BKM Tridaya Waru Mandiri dilakukan secara terus-menerus serta masyarakat Kelurahan Karangwaru selalu diikut sertakan dalam setiap pengambilan keputusan, akhirnya masyarakat menjadi lebih membuka diri terhadap program KOTAKU. Masalah rincian dana untuk Program KOTAKU juga selalu terbuka, hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih dilibatkan dalam program KOTAKU.

Ketiga, kondisi implementasi pogram bersifat baru atau memperbaharui program sebelumnya. Indikator ini lebih menekankan kepada kondisi program KOTAKU, sebagai program yang menggantikan program sebelumnya yaitu program P2KKP (Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman). Setelah 6 bulan program P2KKP dilaksanakan, program P2KKP diubah namanya menjadi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dengan demikian program KOTAKU ini

merupakan program yang memperbarui kebijakan sebelumnya yaitu P2KKP.

Tepat Lingkungan

Dukungan lingkungan internal kebijakan dapat dilihat dari interaksi antar lembaga yang dilibatkan dalam program KOTAKU. Lembaga yang dilibatkan dalam pelaksanaan program KOTAKU Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta dan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Tridaya Waru Mandiri. Interaksi antara Dinas Kimpraswil dengan BKM Tridaya Waru Mandiri dapat dilihat dari koordinasi mereka mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan yang dijalankan. Dalam masalah dana, Kimpraswil juga bekerjasama dengan masyarakat. Dinas Kimpraswil mengurus pencairan dana dari pusat sedangkan BKM Tridaya Waru Mandiri yang meaksanakan kegiatan sesuai dengan besaran dana yang diterima.

Sedangkan lingkungan eksternal berupa persepsi dan masyarakat terhadap suatu program. Secara umum, masyarakat Kelurahan Karangwaru memberikan respon positif dan mendukung terhadap program-program penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Karangwaru. Hal ini ditunjukkan dengan adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penghijauan, penanganan masalah sampah dan limbah, saluran air, hingga

permukiman kumuh dalam Pogram KOTAKU. Kegiatan dalam Program KOTAKU sudah cukup berhasil merubah masyarakat menjadi lebih peduli menjaga lingkungan mereka.

Tepat Proses

Tepat proses, terdiri atas tiga proses. Yaitu *Policy Acceptance*, *policy adoption*, *srategic Readiness*, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan.

Pertama, *policy acceptance*. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta masih mengacu pada Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 216 serta Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya NOMOR 110. Dalam hal ini Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta yang merupakan Dinas yang berwenang dalam melaksanakan program tersebut menerima program KOTAKU, memberikan pengetahuan atau sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Karangwaru tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Melalui sosialisasi tersebut, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta memberikan pengarahan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kepada BKM Tridaya Waru Mandiri serta masyarakat Kelurahan Karangwaru. Karena dari sosialisasi inilah

awal dari program yang dilaksanakan akan berhasil atau tidak berhasil. Peran Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta selanjutnya adalah sebagai fasilitator dan koordinator program KOTAKU. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta menjadi fasilitator BKM untuk mengkoordinasi program KOTAKU dimulai dari perencanaan mencakup sosialisasi hingga masalah dana dan pelaksanaan program KOTAKU.

Kedua, policy adoption. Setelah dilaksanakannya program KOTAKU, masyarakat mulai mengerti dan memahami apa yang merupakan tujuan dari program yang dilaksanakan tersebut. Hanya saja masih ada masyarakat yang kurang mengerti program KOTAKU. Tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta dan BKM. Masyarakat perlu diberikan pengarahan dan pemahaman tentang program KOTAKU secara lebih spesifik. Jika warga menginginkan rumah baru, maka bukan program KOTAKU yang perlu merealisasikannya. Namun, ada program lain di Kelurahan Karangwaru yaitu program rumah swadaya.

Ketiga, strategic readiness Implementasi program KOTAKU sudah berjalan dengan baik. Peran dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta sebagai fasilitator dan koordinator program sudah dilaksanakan.

Ketika terjadi masalah dalam program KOTAKU, BKM mengkoordinasikan dengan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta. Setelah dikoordinasikan, nantinya BKM yang akan memecahkan masalah tersebut sesuai dengan saran dan masukan dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta belum bisa dikatakan efektif. Hal itu disebabkan karena ada salah satu kriteria keberhasilan program KOTAKU belum bisa dipenuhi, yaitu penyediaan pengamanan kebakaran.

Indikator pertama, tepat kebijakan. Peran Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta dalam program KOTAKU telah berjalan dengan baik, khususnya dalam penyediaan jalan lingkungan, keteraturan bangunan, penyediaan sistem drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, serta penyediaan ruang terbuka publik. Namun untuk penyediaan pengamanan kebakaran, program KOTAKU belum dapat merealisasikannya. Hal ini menyebabkan program KOTAKU belum bisa dikatakan

efektif karena salah satu kriteria dari program KOTAKU belum dapat

Indikator kedua, tepat pelaksana. Adanya kerjasama serta penyesuaian tugas dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, BKM Tridaya Waru Mandiri, serta masyarakat telah terlaksana dengan baik. Meskipun dalam pelaksanaannya masih membutuhkan dukungan dari program lain seperti program M3K serta program PLPBK yang ditangani oleh LPPM.

Indikator ketiga, tepat target. Dengan adanya perencanaan program yang matang serta keterbukaan informasi, masyarakat menjadi siap untuk menerima program KOTAKU meskipun ada salah satu kriteria program KOTAKU yang belum berhasil dilaksanakan, namun ketujuh kriteria program KOTAKU sudah berjalan meskipun masih didukung oleh Program M3K dan PLPBK.

Indikator keempat, tepat lingkungan. Lingkungan internal dari Program KOTAKU yaitu instansi yang berperan. Lingkungan internal dapat mendukung proses perancangan suatu program. Dalam program KOTAKU, terdapat keterbukaan informasi antara Dinas Kimpraswil dan masyarakat. Sedangkan lingkungan eksternalnya mencakup persepsi masyarakat terhadap program. Masyarakat Kelurahan Karangwaru memberikan respon positif

dan mendukung terhadap program-program penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Karangwaru.

Indikator kelima, tepat proses. Proses dalam melaksanakan suatu program sangatlah penting. Suatu program akan berhasil jika proses dalam melaksanakan program baik. Sejauh ini proses dalam melaksanakan Program KOTAKU di Kelurahan Karangwaru sudah baik. Dimulai dari sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dan BKM Tridaya Waru Mandiri terhadap masyarakat Karangwaru hingga pelaksanaan program KOTAKU masyarakat berperan dalam setiap kegiatan.

Implikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program KOTAKU di Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta belum dapat dikatakan efektif, hal ini dikarenakan ada beberapa indikator Program KOTAKU yang belum dapat dipenuhi misalnya pengamanan kebakaran. Padahal ini sangatlah diperlukan mengingat Kelurahan Karangwaru memiliki jumlah penduduk yang padat. Hal ini mengandung implikasi bahwa peran dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta sangatlah diperlukan. Peran masyarakat sudah dapat dikatakan baik dalam

memelihara sarana dan prasarana yang terdapat di Kelurahan Karangwaru. Sehingga masih perlu dilakukan beberapa perencanaan terkait dana yang harus digulirkan untuk pengadaan pengamanan kebakaran.

Saran

Bagi pemerintah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta hendaknya lebih aktif dalam monitoring Program KOTAKU untuk melihat pengelolaan sarana dan prasarana Program KOTAKU. Sedangkan bagi masyarakat, masyarakat harus bisa menggunakan dana dari pemerintah dengan bijak untuk pelaksanaan Program KOTAKU.

DAFTAR PUSTAKA

Fikra Sutan Purnama (2017). Partisipasi Masyarakat Kelurahan Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Terhadap Program Pemberdayaan Kota Tanpa Kumuh. Skripsi, tidak dipublikasikan. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Muchsin dan Putra, Fadillah (2002). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averoes Press

Riant Nugroho (2012). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Saraswati, D.T (2004). *Analisis Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di D.K.I Jakarta (Studi Kasus Kelurahan Kapuk,*

Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat)

SK Walikota Nomor 216 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta

Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA

William Dunn (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press